

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)

Ella Alfianita, Andy Fefta Wijaya, Siswidiyanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: alfianita34@yahoo.com

Abstract: *Revitalization of Traditional Market Based On Good Governance Perspective (A Study at Tumpang Market in Kabupaten Malang).* Revitalization policy of traditional markets is very important to be implemented, as we know it has been known that there is an unhealthy competition between the traditional and the modern market. This policy is successfully implemented, is the Tumpang Market in Kabupaten Malang. This research aims to identify, analyze, and describe patterns of cooperation among actors that involved in the revitalization of traditional markets in Tumpang Market based on perspective good governance and efforts taken in the revitalization of the market. This research using qualitative descriptive research methods. Agreements made could be going well which can be measured from the four principles of good governance, such as accountability, participation, predictability (rule of law) and transparency. Efforts that have been taken consisting of the precisely physical aspects (development and improvement of market structure) and non-physical aspects (fostering and empowerment of human resource).

Keywords: *revitalization, Traditional Market, Good Governance Perspective*

Abstrak: *Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang).* Kebijakan revitalisasi pasar tradisional penting diimplementasikan, karena seperti yang telah diketahui bahwa terjadi persaingan yang tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern. Kebijakan ini berhasil diimplementasikan yang salah satunya pada Pasar Tumpang Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menggambarkan pola kerjasama antar aktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam perspektif *good governance* dan upaya apa saja yang diambil dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kerjasama yang telah dilakukan dapat dikatakan berjalan dengan baik yang dapat diukur dari empat prinsip *good governance*, antara lain *accountability, participation, predictability (rule of law)*, dan *transparency*. Upaya yang telah diambil terdiri dari aspek fisik (pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar) dan aspek nonfisik (pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia).

Kata Kunci: *revitalisasi, Pasar Tradisional, Perspektif Good Governance*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam beberapa provinsi, kabupaten dan kota untuk mempermudah pelimpahan tugas dan wewenang. Konsep tersebut sejalan dengan konsep desentralisasi yang mempunyai tujuan utama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Demi mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera perlu adanya pembangunan di suatu daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan secara umum berarti perbaikan di

semua sektor, salah satunya adalah pembangunan dibidang ekonomi yaitu pembangunan pasar. Pentingnya pembangunan pasar karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan pasar telah menjadi penopang utama perekonomian di suatu daerah.

Menurut jenisnya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Fakta yang terjadi sekarang adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara keduanya. Hal tersebut akan berdampak pada eksistensi pasar tradisional jika tidak diperhatikan, karena jumlah pasar modern yang diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Salah satu strategi dari adanya fenomena tersebut adalah dilaksanakannya

kebijakan revitalisasi pasar tradisional. Kebijakan tersebut terealisasi dengan baik di Kabupaten Malang, tepatnya di Pasar Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan SK Bupati Nomor 180/432/KEP/421.013/2012 dan diresmikan tepatnya hari Sabtu, 1 Maret 2014.

Persoalan yang kerap kali muncul adalah kebijakan revitalisasi hanya sekedar perbaikan fisik saja, meski yang seharusnya lebih diperhatikan adalah masalah manajemen pasar (non fisik). Maka dari itu praktek revitalisasi mengacu pada *perspektif good governance*, karena *good governance* adalah bentuk penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab. Maka penulis merumuskan masalah bagaimana pola kerjasama antar aktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam perspektif *good governance* dan upaya apa saja yang ditempuh dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola kerjasama antar aktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam perspektif *good governance* dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya apa saja yang ditempuh dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang.

Tinjauan Pustaka

A. Administrasi Publik

Definisi paling awal tentang administrasi publik disampaikan oleh Woodrow Wilson dalam Priyono dan Mandala (2010, h.111), yaitu “...as the detailed and systems of public law...”. Dengan demikian Wilson memisahkan antara wilayah politik dengan wilayah administrasi. Selanjutnya menurut Starling dalam Sjamsuddin (2006, h.116) administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintahan, yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye. Terdapat tiga fungsi administrasi publik menurut Tjokroamidjojo dalam Priyono dan Mandala (2010, h.112), antara lain formulasi/perumusan kebijakan, pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi dan penggunaan dinamika administrasi.

Pada perkembangannya paradigma administrasi publik oleh Nicholas Henry dalam Islamy (2003, h.10) adalah sebagai berikut: Paradigma 1: Dikotomi Politik – Administrasi (1900-1926), Paradigma 2: Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937), Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970), Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu

Administrasi (1956-1970), Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang).

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1974, h.33) adalah proses pengendalian usaha oleh negara/pemerintah yang digunakan untuk merealisasi pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan menurut Siagian (2001, h.5) administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertambah, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

C. Governance dan Good Governance

Menurut Islamy (2003, h.68) istilah *governance* merefleksikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mencakup dan mampu menangani semua isu-isu. Selanjutnya, dalam *governance* terdapat paradigma *good governance* yang mencoba menggabungkan konsep-konsep paradigma yang ada sebelumnya dengan mengambil segi positifnya. Sementara itu LAN (2000) dalam Nugroho dan Hanurita (2005, h.150) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

D. Pasar

Definisi pasar menurut Sukirno (2003, h.25) adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak terwujud dalam fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Secara umum pasar dibedakan atas pasar tradisional dan pasar modern. Menurut Sudarman (1992, h.16) pasar memiliki lima fungsi utama, diantaranya adalah pasar menetapkan nilai (*sets value*), mengorganisasi produksi, mendistribusikan barang, penyelenggara penjatahan, serta dapat mempertahankan dan mempersiapkan keperluan masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Sukirno (2003, h.227-326) terdapat struktur atau bentuk-bentuk pasar yang dapat dibedakan atas pasar persaingan sempurna (*perfect competition*), pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli dan pasar duopoli.

E. Revitalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi merupakan proses, cara dan perbuatan memvitalkan (menjadi vital). Sedangkan vital sendiri mempunyai arti penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Fokus utamanya pada struktur manajemen yang harus dikelola dengan baik oleh aktor yang berkompeten, serta polanya mengikuti perubahan-perubahan, sehingga benar jika konsep revitalisasi mengacu pada program pembangunan.

F. Revitalisasi Pasar Tradisional

Salah satu cara merevitalisasi yaitu menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi dan kegunaan, seperti tempat bersantai atau tempat rekreasi bersama dengan keluarga. Revitalisasi pasar tradisional bertujuan meningkatkan pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern. Menurut Paskarina dalam Mangeswuri dkk (2010,h.320) dasar pertimbangan melakukan kerjasama merevitalisasi pasar tradisional antara lain berubahnya pandangan pasar dari tempat interaksi ekonomi menjadi ruang publik, yang difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan. Fungsi pembangunan pasar juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial dan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian perdagangan kecil serta perlu melibatkan pengembang untuk dikelola secara kreatif.

G. Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Perspektif *Good Governance*

Hal yang mendasari bahwa revitalisasi pasar tradisional ini erat hubungannya dengan *good governance* karena revitalisasi mendukung penuh pelaksanaan *good governance*. Konsep *good governance* adalah baik yang berupaya memenuhi harapan-harapan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan. Pernyataan tersebut sejalan dengan upaya pembangunan, khususnya pembangunan daerah yang berdasarkan dari manajemen tata kelola pemerintahan daerah setempat yang baik dan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi pasar tradisional dalam kaitan ini dapat dilihat dari fungsi pasar sendiri yang salah satunya sebagai penopang utama perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu sistem pembangunan pasar atau revitalisasi ini mengacu pada konsep penataan tata ruang kota, yang semua itu

berhubungan dengan upaya pembangunan daerah dan nantinya tercipta *good governance*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Abercrombie, Hill, Turner dalam Moleong (2005,h.54) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dicirikan oleh tujuan penelitian yang ingin memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala-gejala yang tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat atau kuantitatif. Selanjutnya yang dinamakan penelitian deskriptif menurut Arikunto (2006,h.234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) kerjasama antar aktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam perspektif *good governance* (2) upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang.

Lokasi penelitian di Kabupaten Malang dan situs penelitian pada Pasar Tumpang Kabupaten Malang. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Instrumen penelitian diantaranya peneliti sendiri, perangkat penunjang seperti catatan dan alat tulis dan pedoman wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Milles, Hubberman dan Saldana (2014,h.33), yang terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Pembahasan

1. Kerjasama antaraktor dalam revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang dalam perspektif *good governance*

Pada revitalisasi Pasar Tumpang Kabupaten Malang terdapat beberapa aktor yang terlibat, diantaranya adalah pemerintah yang terdiri dari Disperindag, UPPD Tumpang, petugas parkir dan petugas kebersihan; pihak swasta yang terdiri dari pedagang, pedagang kaki lima, dan peguyuban pedagang Pasar Tumpang Kabupaten Malang (P3TKM); serta masyarakat sekitar Pasar Tumpang termasuk para konsumen. Kerjasama ketiga aktor tersebut terwujud dari proses

perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi.

Pola kerjasama yang terwujud dalam proses revitalisasi Pasar Tumpang termasuk dalam bentuk kerjasama *written agreements* dan *joint service*. Bentuk *written agreements* adalah kerjasama yang didasarkan pada perjanjian tertulis dapat terlihat dari proses rincian biaya pendirian bangunan dan retribusi pasar yang di dapat dari hasil kerjasama disperindag, DCKTR, PT3KM serta masukan dari para konsumen. Sementara bentuk *joint service* adalah kerjasama dalam memberikan pelayanan publik yang terwujud dalam keberhasilan proses pembangunan gedung pasar yang merupakan pelayanan publik yang vital karena menjadi penopang utama kegiatan perekonomian di daerah.

Dilihat dalam perspektif *good governance* Dilihat dalam perspektif *good governance*, masing-masing dari peran aktor yang terlibat telah mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Bank Dunia dalam Tjokroamidjojo (2004,h.138), terdapat empat prinsip utama yang terpenting dalam *good governance*. Empat prinsip tersebut adalah

- 1) *Accountability*, dalam kaitan peran pemerintah dalam revitalisasi Pasar Tumpang adalah bentuk tanggungjawab atas kebijakan yang dibuat. Hal tersebut terbukti dengan perwujudan pembangunan pasar yang dibedakan atas tiga tahap, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- 2) *Participation*, dalam kaitan dengan revitalisasi Pasar Tumpang konsep partisipasi yang dilakukan pemerintah dengan memberikan ruang dalam hal pengambilan keputusan serta memberikan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat.
- 3) *Predictability (rule of law)*, bentuk dari *rule of law* terlihat pada pembagian los, bedak, dan toko baik di TPS maupun pada pasar yang baru. Keputusan tersebut didapat dari hasil musyawarah antara pemerintah, P3TKM, bersama pedagang.
- 4) *Transparency*, Dalam kaitan dengan Pasar Tumpang adalah keterbukaan segala informasi terkait pasar, termasuk penarikan retribusi dan biaya pembangunan. Biaya pembangunan akan dimuat dalam papan pengumuman jika semua pembangunan gedung telah selesai, sementara besarnya jumlah retribusi biasanya akan dimuat dalam agenda bulanan di kantor disperindag.

2. Upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang Kabupaten Malang

Serangkaian upaya telah ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang. Upaya tersebut dibedakan atas aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik yang berarti pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar, yang terdiri dari: 1) pemilihan lokasi pasar yang tetap pada posisi semula, alasannya karena sudah memenuhi standar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pemilihan bahan bangunan yang berkualitas baik 2) perbaikan saluran drainase yang didukung dengan melakukan pengecekan rutin setiap sebulan sekali 3) tempat pembuangan sampah yang disediakan lebih luas yang dirancang sedemikian rupa agar mempermudah akses jalan bagi truk pengangkut sampah 4) penyediaan lahan parkir yang mengacu pada standar yang berlaku, yaitu terdapat pemisahan yang jelas pada batas wilayah pasar, pemisahan berdasarkan jenis kendaraan, tersedia area bongkar muatan, dan tidak mengganggu akses keluar masuk pasar 5) ditambahkannya jumlah toilet umum/kamar mandi yang dipisahkan atas laki-laki dan perempuan.

Selain itu terdapat aspek nonfisik yang berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Dalam perspektif *good governance* diharuskan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Seperti yang diungkapkan Tjokroamidjojo (2004,h.60), bahwa perkembangan ke arah yang lebih baik harus ada proses *empowerment of man*/pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan antara lain 1) aparat pasar yang dilakukan pada aparat pasar melalui rapat bulanan yang menjadi agenda/rutinitas dalam disperindag 2) pedagang yang meliputi pembinaan disiplin pedagang dalam mematuhi peraturan termasuk memelihara kebersihan dan ketertiban pasar, membayar retribusi tepat waktu, serta meningkatkan kompetensi berdagang sehingga dapat menarik konsumen/pembeli 3) pedagang kaki lima (pk1) yang kedepannya keberadaan pk1 lebih diperhatikan dengan ditempatkan di dalam blok a Pasar Tumpang yang secara otomatis menjadi pedagang tetap 4) petugas parkir yang sekarang berjumlah 200 orang, yang terdiri dari pemuda sekitar yang tidak bekerja. Mereka dibekali dengan berbagai informasi terkait dengan pemberian pelayanan yang baik pada konsumen, menjaga ketertiban dan kebersihan daerah parkir, pelarangan minum-minuman keras serta membantu pemerintah dalam hal penertiban dan pengawasan pk1 dengan melarang berjualan di

area parkir 5) petugas parkir dengan memberikan informasi mengenai daerah yang menjadi tanggung jawabnya, karena terdapat peraturan baru yang dibuat setelah pembangunan pasar baru selesai.

Kesimpulan

Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Pasar Tumpang sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan perspektif *good governance*, pernyataan tersebut didasarkan atas upaya kerjasama/sinergi yang baik dari ketiga aktor. Bentuk dan pola kerjasama yang terwujud dalam

proses revitalisasi Pasar Tumpang termasuk dalam bentuk kerjasama *written agreements* dan *joint service*. Pada proses revitalisasi Pasar Tumpang telah mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah akuntabilitas, partisipasi, *predictability (rule of law)*, dan transparansi. Dalam mendukung proses revitalisasi terdapat berbagai upaya, antara lain adalah aspek fisik yang berfokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas pasar dan aspek nonfisik yang berfokus pada pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2006) **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta, Rineka Cipta
- Domai, Tjahjanulin. (2010) **Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Perspektif Sound Governance**. Surabaya, Jenggala Pustaka Utama
- Islamy, I. (2003) **Dasar-dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik**. Malang, Medio
- Mangeswuri, Dewi, R. dan Purwanto, N.P. (2010) **Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik**. Vol.2 No. 1 Desember 2010
- Milles, Hubberman dan Saldana. (2014) **Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook**, SAGE Publications, Inc
- Moleong, L.J. (2005) **Metode Penelitian**. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Nugroho D, Riant dan Hanurita S,T. (2005) **Tantangan Indonesia: Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang**. Jakarta, Elex Media Komputindo
- Prijono T, Mandala, M. (2010) **Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya**. Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press)
- Siagian, Sondang P. (2001) **Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya**. Jakarta, Bumi Aksara
- Sjamsuddin, S. (2006) **Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik**. Malang, Agritek YPN
- Sudarman, A. (1992) **Teori Ekonomi Mikro, Edisi Ketiga**. Yogyakarta, BPFE
- Sukirno, S. (2003) **Pengantar Teori Mikro Ekonomi**. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Tjokroamidjojo, B. (1974) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta, LP3ES
- Tjokroamidjojo, B. (2004) **Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani**. Jakarta, LAN 2002